

## Bupati Gianyar Serahkan Bansos Senilai Rp 1 Miliar

### ● 'Musibah Bangunan Pura Amblas'

**KRAMA** Desa Pakraman Badung, Payangan akhirnya bisa bernapas legas. Sebab, mereka telah mendapatkan dana untuk memperbaiki bangunan Pura Dalem, yang amblas akibat hujan lebat, pada awal Januari 2019 lalu. Dana perbaikan sebesar Rp 1 miliar ini, diberikan Bupati Gianyar, Made Mahayastra dalam bentuk dana bantuan sosial (bansos). Serah terima telag dilakukan pada Sabtu (17/2) lalu.

Bendesa Adat Badung I Wayan Darmika mengatakan, musibah tersebut berawal saat hujan lebat mengguyur Banjar Badung, Sabtu (12/1) lalu. Lantaran tanah menjadi labil, Pura Prajapati amblas ke dalam jurang sedalam 15 meter. Adapun bangunan yang roboh tersebut, terdiri dari dua pelinggih Prajapati beserta tembok, pelinggih Ulun Pangkung dan sebuah bangunan perantenan (dapur) berukuran 6 x 12 meter.

Awalnya, pihaknya pun mengaku kebingungan mencari dana perbaikan. Sebab renovasinya membutuhkan dana yang relatif besar. Namun dengan adanya bantuan dari Bupati Gianyar, proses perbaikan pun bisa dilakukan. Saat ini, kata dia, pihaknya sudah melakukan pembersihan dan perataan tanah di lokasi longsor. Dimana nantinya, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan senderan sepanjang 35 meter untuk mengindari kejadian serupa terjadi



**BUPATI GIANYAR**, Made Mahayastra saat mendampingi Desa Pakraman Badung memberikan bantuan senilai Rp 1 miliar, untuk perbaikan bangunan pura yang rusak akibat longsor.

lagi. Setelah itu, pembuatan pelinggih Pura Prajapati.

"Bangunan pelinggih prajapati ini harus segera diperbaiki, yang kalau ada kematian harus melakukan upacara di sini. Begitupula halnya dengan tembok senderan karena jika tidak segera dibangun takutnya jika terjadi hujan deras akan terulang musibah serupa," ujarnya.

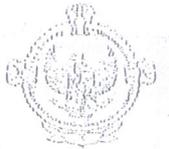
Berdasarkan hasil musyawarah dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait, kata Darmika, rehab bangunan pelinggih dan senderan membutuhkan biaya Rp 3,5 miliar. Lantaran biaya yang cukup tinggi ini, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Selain bantuan dari pemerintah, untuk sisanya akan dilakukan penggalan dana dan mungkin juga peturunan dari warga desa yang berjumlah sekitar 411 KK.

Namun pihaknya tidak

bisa mengharuskan warga untuk urunan dalam jumlah yang besar, mengingat kebanyakan mata pencaharian warganya adalah petani. "Kami sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari bupati, sehingga beban kami bisa diringankan," tegasnya.

Bupati Gianyar Made Mahayastra mengimbau masyarakat selalu waspada akan bencana alam yang kerap datang secara tiba-tiba. Saat ini hujan masih sering mengguyur Gianyar, masyarakat harus tetap waspada. Terkait rehab bangunan di Pura Dalem di Br. Badung Desa Melinggih Payangan, Bupati berpesan agar rehab segera dilakukan karena terkait dengan proses agama dan adat istiadat di wilayah setempat. Pihaknya berharap bantuan itu dapat meringankan beban peturunan masyarakat.

(adv/weg)



## Bupati Suwirta Harap Desa Terbuka Kelola Keuangan



• IST

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri penandatanganan kerjasama antara Kejari dengan Inspektorat Daerah dan pemerintah desa se-Kabupaten Klungkung, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (19/2).

SEMARAPURA, NusaBalu

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengharapkan pemerintah desa agar terbuka dalam mengelola keuangan. Hal itu ditegaskan saat menghadiri acara penandatanganan kerjasama antara Kejaksaan Negeri Klungkung (Kejari) dengan Inspektorat Daerah dan pemerintah desa se-Kabupaten Klungkung, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (19/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Otto Sompotan, OPD, para perbekel se-Kabupaten Klungkung. Perjanjian ini tentang pen-

egakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berharap melalui kerjasama ini pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di setiap desa harus menjadi prioritas. Karena kualitas SDM yang baik itu akan menghasilkan output yang lebih baik tentu sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu. "Masing-masing desa harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya," ujarnya.

Bupati mengaku, setiap hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK

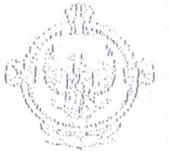
dibacanya satu-persatu. Ketelitian ini agar pekerjaan sesuai aturan dan tidak akan ada masalah. "Jangan takut menggunakan dana desa. Tinggal sekarang bagaimana seluruh kepala desa berani melangkah di tengah ketatnya regulasi yang ada kadang-kadang membuat kita ragu mengambil keputusan," ujar Bupati Suwirta

Kepala Kejari Klungkung Otto Sompotan mengatakan, kejaksaan sebagai penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pihaknya siap memberikan pengawalan, pendampingan dan pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan di Kabupaten Klungkung. "Konsultasi ke Kejaksaan Negeri Klungkung tidak dipungut biaya, kami dengan senang hati melayani sesuai dengan kemampuan kami," ujarnya.

Oleh karena itu, laksanakan fungsi pemerintahan yang baik dari manajemen, sistem pengawasannya sistem manajemen aparaturnya memang perlu diadakan kerjasama karena saling berkaitan dan saling mengingatkan khususnya dalam pelaksanaan fungsi inspektorat. "Berikan kami informasi secara keseluruhan jangan ada yang ditutup-tutupi karena saya percaya pelaksanaan kerjasama ini bisa sukses" ujar Otto Sompotan. **wan**

Edisi : Rabu, 20, Feb, 2019

Hal : 6



## Karya Melaspas di Pura Dalem Umacetra Karangasem **Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 300 Juta**

MANGUPURA, NusaBali

Serangkaian Puncak Karya Melaspas Ngresi Gana Ngenteg Linggih, Nubuk Pedagingan Pura Dalem Desa Pekraman Umacetra Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 300 juta yang diterima oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Umacetra I Nyoman Sukra, disaksikan tokoh serta krama setempat pada Anggara Kliwon Tambir, Selasa (19/2).

Bupati didampingi Kabag Humas I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Kepala Bank BPD Cabang Mangupura I Gusti Ngurah Agung Artawan, serta tokoh masyarakat Badung I Bagus Alit Sucipta.

Usai sembahyang bersama, Bupati Giri Prasta menyatakan rasa syukur dapat hadir bersama krama untuk mengatur bakti kepada sesuhunan di Pura Dalem Desa Umacetra. Bupati Giri Prasta mengutarakan bantuan dana hibah ini adalah wujud komitmen Kabupaten Badung untuk ikut melestarikan agama, adat, dan budaya serta untuk membantu kebutuhan komunal masyarakat. Harapannya, dana



• IST  
BUPATI Giri Prasta (kiri) menyerahkan hibah saat menghadiri Puncak Karya Melaspas Ngresi Gana Ngenteg Linggih, Nubuk Pedagingan Pura Dalem Desa Pekraman Umacetra Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Selasa (19/2).

hibah ini dapat membantu serta meringankan krama pangempon pura dalam melaksanakan upacara Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih.

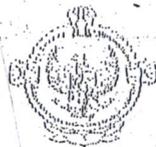
Panitia Karya I Kadek Ngurah Astawa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Badung dan seluruh jajaran yang telah menghadiri puncak karya di Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra Kecamatan Selat, Kabu-

paten Karangasem pada Anggara Kasih Tambir Purnama kesanga. "Kehadiran Bapak Bupati Badung ini sangat membantu kami krama pangempon pura dalam melaksanakan sradha bhakti kepada sesuhunan di Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra," ungkapnya.

Setelah persembahyangan, Bupati Giri Prasta berbaur bersama krama santap siang bersama dengan tradisi magibung. @

Edisi : Rabu, 20, Feb, 2019

Hal : 2



# Dana Desa di Jembrana Meningkat Rp 9 M

Tahun ini di Jembrana tidak ada alokasi afirmasi yang khusus diberikan untuk kategori desa tertinggal. Tahun 2018 ada dua desa penerima dana afirmasi, keduanya di Kecamatan Melaya.

NEGARA, NusaBali

Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp 49.043.178.000 untuk 41 desa se-Kabupaten Jembrana di 2019 ini. Alokasi dana desa tahun ini meningkat sebesar Rp 9.651.454.000 dari alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp 39.391.724.000. Pencairan dana desa tahap pertama diperkirakan akan berlangsung pada Maret mendatang.

Sesuai data yang diterima di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jembrana, dana desa terbesar tahun ini dialokasikan untuk Desa Melaya, Kecamatan Melaya, yang juga menjadi penerima alokasi

dana desa terbesar tahun lalu. Tahun ini Desa Melaya menerima alokasi dana desa sebesar Rp 1.825.057.368, atau meningkat sebesar Rp 400 juta lebih dibanding desa tahun lalu yang sebesar Rp 1.401.788.000. Sedangkan alokasi dana desa terkecil tahun ini, dialokasikan untuk Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo sebesar Rp 909.788.556.

Pengalokasian dana desa ini sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yakni, alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi. Alokasi dasar yang nilainya sama per masing-masing desa, tahun ini dialokasikan sebesar Rp 672.421.000 per desa,

atau naik sebesar Rp 56 juta lebih dibanding alokasi dasar tahun lalu yang sebesar Rp 616.345.000 per desa. Sedangkan untuk alokasi formula yang ditentukan berdasar rasio jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio kesulitan geografis di masing-masing desa, nilainya bervariasi dengan nilai terbesar Rp 1.152.636.368 untuk Desa Melaya, dan terkecil Rp 237.367.556 untuk Desa Mendoyo Dangin Tukad.

Sedangkan untuk alokasi afirmasi yang khusus diberikan untuk kategori desa tertinggal, tidak ada diterima tahun ini. Sementara tahun

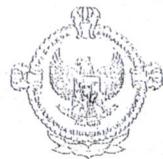
lalu, ada dua desa di wilayah Kecamatan Melaya yang menerima alokasi afirmasi dengan nilai masing-masing Rp 157.549.000, yakni Desa Manistutu dan Desa Warnasari. "Yang dimaksud kategori desa tertinggal, adalah desa dengan memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Nah tahun ini, tidak ada yang masuk kategori desa tertinggal, sehingga tidak ada menerima alokasi afirmasi," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jembrana Gede Sujana, Selasa (19/2).

Terkait pengalokasian dan penggunaan dana desa tahun ini, juga sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup)

Nomor 2 Tahun 2019. Sesuai aturan dimaksud, untuk pencarian dana desa ke masing-masing desa, dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap dengan pembagian 20 persen pada tahap I, dan masing-masing 40 persen pada tahap II dan III. Aturannya, sebelum memasuki pencarian tahap selanjutnya, masing-masing desa harus menginput laporan tentang penyerahan dana desa tahap sebelumnya. "Nah, untuk pencairan tahap I tahun ini, sedang proses input laporan serapan dana desa tahap III tahun 2018. Kami targetkan, pelaporan ini sudah selesai paling lambat bulan ini, sehingga paling tidak bulan depan sudah bisa

dicairkan (pencairan tahap I 2019, Red)," kata Sujana.

Sesuai aturan, Bupati dapat menunda penyaluran dana desa tahap I ke desa, apabila belum menerima Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes. Selain itu, penundaan penyaluran dana desa juga bisa dilakukan apabila masih terdapat sisa dana desa lebih dari 30 persen di rekening kas desa (RKD) tahun anggaran sebelumnya. Artinya dana desa harus terserap minimal 70 persen, dan khusus desa-desa di Jembrana, dipastikan sudah memenuhi ketentuan tersebut, dengan serapan rata-rata mencapai 90 persen. ode



# Dewan Pertanyakan Perekrutan PPPK

Amlapura (Bali Post) -

Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Karangasem, dipertanyakan dewan. Sebab, pihak eksekutif untuk perekrutan itu dianggap tidak pernah menyampaikan ke dewan sebelumnya. Hal itu terungkap pada rapat gabungan komisi, DPRD Karangasem dengan eksekutif, Selasa (19/2) kemarin.

Ketua DPRD I Nengah Sumardi mempertanyakan perekrutan PPPK tersebut. Sebab, pihaknya belum menerima laporan secara resmi dari eksekutif terkait proses perekrutan PPPK tersebut. Malah pihaknya mendengar informasi itu justru dari media.

"Kita sayangkan belum ada informasi ke dewan terkait perekrutan ini. Kalau seperti

ini seakan-akan pemerintah itu berjalan sendiri. Padahal, eksekutif dengan legislatif itu harusnya berjalan bersama bergandeng saling koordinasi. Sehingga bila ada hal seperti itu seharusnya kita diberikan informasi. Sehingga kita tahu ada rekrutmen seperti ini," ujar Sumardi.

Sedangkan pihak eksekutif yang dipimpin asisten Setda Karangasem I Wayan Purna,

yang didampingi sejumlah kepala OPD, mengatakan, kalau perekrutan PPPK di Karangasem, baru dilakukan tahap pertama. Pada tahap pertama ini ada 23 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Mereka yang memenuhi syarat itu yakni dari pegawai K-2 sebanyak 23 orang. Rinciannya 20 orang dari penyuluh pertanian serta 3 orang adalah guru.

"Pegawai yang masuk kategori K-2 sudah terdaftar pada data base-nya BKN itu sudah langsung muncul di webnya BKN. Dari 23 orang yang masuk, malah satu orang memasuki masa pensiun," katanya.

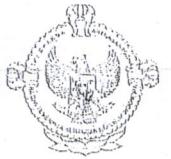
Purna membantah bila ada surat edaran dari Kabag Hukum Setda Karangasem terkait proses perekrutan tersebut. Untuk pembiayaan gaji PPPK itu nantinya akan dibiayai Pemkab Karangasem. Sumber anggarannya berasal dari belanja tidak langsung.

"Jika tenaga kontrak itu gajinya bersumber dari belan-

ja langsung. Namun berbeda dengan gaji PNS dan PPPK itu justru diambil dari belanja tidak langsung," tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Gusti Made Rinceg menjelaskan, perekrutan PPPK tahap pertama itu telah dilakukan. Dalam lima tahun ke depan, pihaknya akan mengoptimalkan tenaga kontrak untuk diarahkan ke PPPK.

"Kita punya target di tahun kelima, dipastikan semua tenaga kontrak itu menjadi PPPK. Terpenting mereka itu memenuhi persyaratan," jelas Rinceg. (kmb41)



Hadiri "Karya Melaspas" di Pura Dalem Umacetra Karangasem

## Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 300 Juta



**HIBAH** - Bupati Giri Prasta menyerahkan hibah saat menghadiri puncak Karya Melaspas Ngersi Gana Ngenteg Linggih, Nubuk Padagingan Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Selasa (19/2) kemarin.

**SERANGKAIAN** Puncak Karya Melaspas, Ngersi Gana, Ngenteg Linggih, Nubuk Padagingan Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra Kecamatan Selat, Karangasem, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 300 juta yang diterima langsung oleh Bendesa Desa Pakraman Umacetra I Nyoman Sukra dan disaksikan tokoh serta masyarakat setempat, Selasa (19/2) kemarin. Turut mendampingi Bupati, Kabag Humas Badung I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Kepala BPD Cabang Mangupura I

Gst. Ngurah Agung Artawan, tokoh masyarakat Badung I Bagus Alit Sucipta.

Usai melaksanakan persembahyangan bersama, Bupati Giri Prasta mengatakan, merasa bersyukur dapat hadir bersama masyarakat untuk *ngaturang bhakti* kepada *sesuhunan* di Pura Dalem Desa Umacetra. Dikatakannya, pelaksanaan upacara ini merupakan bentuk bhakti serta yadnya tulus dari kita kepada Ida Sang Hyang Widhi.

Bupati mengutarakan bantuan dana hibah ini adalah wujud komitmen Kabupaten Badung

untuk ikut melestarikan agama, adat dan budaya serta untuk membantu kebutuhan komunal masyarakat. Bupati Giri Prasta berharap, dengan adanya bantuan dana hibah ini dapat membantu serta meringankan masyarakat *pangempon* pura dalam melaksanakan upacara Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih. "Semoga Karya ini dapat berlangsung lancar *labda karya sida sidaningdon* sesuai dengan harapan, dan masyarakat diberikan kerahayuan serta kerahajengan oleh Ida Sesuhunan," terang Bupati Giri Prasta.

Panitia Karya I Kadek Ngurah Astawa dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Badung dan seluruh jajaran yang telah menghadiri Puncak Karya Melaspas Ngersi Gana, Ngenteg Linggih, Nubuk Padagingan Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan bertepatan pada Anggara Kasih Tambir Purnama Kesanga. "Kehadiran Bapak Bupati Badung ini sangat membantu kami masyarakat *pangempon* pura dalam melaksanakan *sradha bhakti* kepada *sesuhunan* di Pura Dalem Desa Pakraman Umacetra," ungkapnya.

Setelah melakukan persembahyangan, Bupati Giri Prasta berbaur bersama masyarakat melaksanakan santap siang bersama dengan tradisi *Magibung*. (ad673)

Edisi : Rabu, 20, Feb, 2019

Hal : 3



## Produksi Air Minum Dalam Kemasan Pemkab Perlu Anggaran Rp 20 Miliar

### Gianyar (Bali Post) -

Pemkab Gianyar kini berencana menyiapkan unit usaha yang memproduksi produk air minum dalam kemasan. Berbagai persiapan tentunya harus dilakukan guna merealisasikan rencana tersebut. Salah satunya, diperlukan anggaran cukup besar yakni mencapai Rp 20 miliar.

Bupati Gianyar Made Mahayastra menerangkan, sebelumnya pemerintah sudah menetapkan Perda Perumda Air Minum Tirta Anyar. Perda tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Direksi yang mengatur tentang stan-

dar kompetensi SDM, kebutuhan restrukturisasi organisasi, antisipasi SDM yang terkait hubungan keluarga, dan rencana pembentukan unit usaha baru. "Termasuk juga akan diikuti dengan pembentukan unit usaha air minum dalam kemasan," kata Mahayastra, belum lama ini.

Mahayastra mengatakan, rencana ini tentunya tidak bisa langsung terwujud. Ada sejumlah persiapan yang harus dipenuhi. Bahkan, total investasi dari rencana ini mencapai Rp 20 miliar. "Ini baru perkiraan. Investasinya senilai Rp 20 miliar. Namun, itu masih dalam kajian termasuk

perhitungan *break event point*nya," ujarnya.

Menurut Mahayastra, rencana ini dicetuskan begitu melihat sasaran konsumen yang cukup banyak di Kabupaten Gianyar, seperti instansi pemerintah ataupun swasta yang meliputi hotel dan restoran. "Melihat peluang ini, kenapa kita tidak menggunakan sumber yang ada yang nantinya bisa lebih higienis dan lebih murah. Toh, nanti keuntungannya bisa menjadi milik masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan nama Perumda Tirta Anyar yang mengandung filosofi air minum baru, diusulkan dalam

Ranperda tentang Pendirian Perumda Air Minum. Namun, sebagai alternatif diusulkan perubahan nama Perumda Air Minum yang semula Tirta Anyar menjadi Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani yang mengandung filosofi air suci yang memberikan kehidupan. Sedangkan untuk logo akan diatur dengan Peraturan Bupati. "Nama bisa saja Sanjiwani biar satu-kesatuan," ujar Mahayastra.

Sementara itu, Dirut PDAM Gianyar I Made Sastra Kencana mengatakan harus ada kajian terlebih dahulu untuk kelayakan sumber air, bila dijadikan air minum dalam kemasan.

Tentunya yang mendekati kelayakan ialah mata air. Ia mencontohkan mata air di Desa Bukian yang sudah dijadikan air minum dalam kemasan dan dikelola oleh BUMDes setempat. "Seperti di Desa Bukian itu sudah bagus pengelolaannya," katanya.

Menurut Sastra Kencana, sumber air PDAM belum ada yang digunakan untuk rencana tersebut. Ditegaskan, harus ada pengujian pH air jika akan dijadikan air minum dalam kemasan. "Belum ada sumber PDAM yang mau digunakan. Saya juga belum ada memeriksa PH sumber air kita," ujarnya. (kmb35)



# Bangun Iradiasi Gamma Rp 150 Miliar

Produk Bisa Diawetkan, Hindari Harga Murah dari Tengkulak

Singaraja (Bali Post) -

Masih ingat dengan wacana pembangunan iradiasi gamma di Buleleng? Rencana itu ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian (Distan) Buleleng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Buleleng. Buleleng telah mengajukan proposal ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan-RI). Tidak tanggung-tanggung, nilai proposal untuk mendapat bantuan biaya pembangunan fasilitas pengawetan produk pertanian dan perkebunan tersebut mencapai Rp 150 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Buleleng Made Sumiarta di ruang kerjanya Selasa (19/2) kemarin, mengatakan, sebelum mengajukan proposal, pemerintah daerah bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah melakukan kajian teknis dan perizinan iradiasi gamma pertama di Bali tersebut. Dari kajian itu kemudian ditindaklanjuti menyusun proposal untuk mendapatkan biaya pembangunan infrastruktur penunjang pertanian dan perkebunan itu. Secara garis besarnya, untuk membangun iradiasi gamma yang menjadi proyek percontohan (*pilot project - red*) tersebut memerlukan anggaran Rp 150 miliar.

"Ini tindak lanjut setelah pemerintah daerah menan-

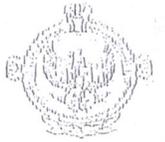
datangani MoU dengan Batan. Selain itu, iradiasi gamma ini kebijakan kita di daerah yang fokus mengatasi permasalahan pertanian dan perkebunan," katanya. Iradiasi gamma, kata Sumiarta, yang akan dibangun itu merupakan proyek strategis. Pasalnya, infrastruktur ini berfungsi mengawetkan komoditas produk pertanian dan perkebunan, termasuk produk pangan yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan teknologi pengawetan teruji itu petani atau penggiat UMKM dapat menyimpan komoditasnya tanpa harus menjual, meskipun ditawarkan dengan harga murah. Sebaliknya, produk itu masih bisa disimpan sembari menunggu harga yang layak, sehingga terhindar dari kerugian yang kerap kali dilakukan oknum pengepul atau tengkulak.

Pemanfaatan iradiasi gamma itu tidak saja untuk petani dan pelaku UMKM di Buleleng. Namun sentra pengawetan itu juga dibangun untuk menyerap produk pertanian perkebunan. Selain itu, produk UMKM dari kabupaten tetangga seperti Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, dan Kabupaten Jembrana. Karena pemanfaatan sebagian besar kabupaten di Bali, sehingga Gubernur Bali Wayan Koster turun tangan berjuang agar usulan proposal pembangunan iradiasi itu bisa dibangun di Bali Utara. "Pemprov

Bali dipimpin langsung Gubernur Bali mengawal seluruh proses. Bappeda dan Dinas Pertanian se-Bali sudah memetakan produk-produk pertanian yang ada di Bali, yang akan memanfaatkan iradiasi di daerah kita," jelasnya. (mud)

Edisi : Rabu, 20, Feb, 2019

Hal : 8



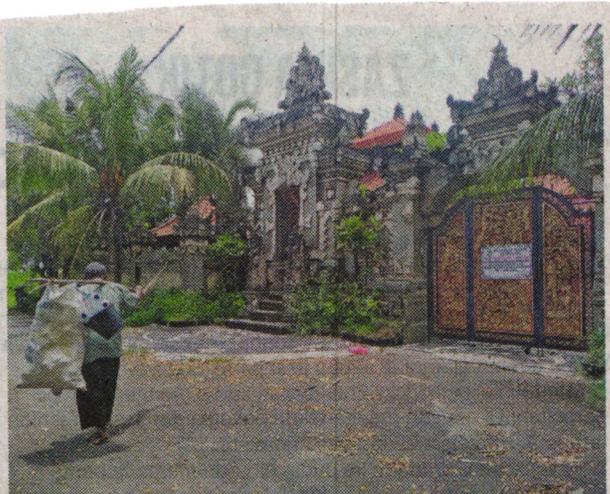
# 10 Aset Mantan Bupati Klungkung Siap Dilelang

● Tersebar di Nusa Penida, Klungkung, Denpasar, dan Badung

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Puri Cempaka, sebutan untuk rumah mewah mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra di Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Klungkung,

siap dilelang. Tak hanya itu, Kejari Klungkung juga bakal melelang sembilan aset lain milik Wayan Candra yang telah berstatus terpidana

**BERSAMBUNG ● HAL 7**



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

**MELINTAS** - Seorang warga melintas di depan Puri Cempaka milik mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra di Jl Bypass Prof IB Mantra, Desa Gunaksa, Klungkung, Rabu (20/2).

## 10 ASET Wayan Candra Siap Dilelang

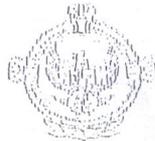


INFOGRAFIS : TRIBUN BALI/PRIMA  
ILUSTRASI: DWI SUPUTRA

- Tanah di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida  
Luas: 9.450 meter persegi
- Tanah di Desa Ped, Nusa Penida  
Luas: 10.000 meter persegi
- Aset lahan di Desa Tojan, Denpasar  
Luas: 850 meter persegi
- Lahan di Dawan Kaler  
Luas: 14.200 meter persegi
- Lahan dan bangunan di Puri Cempaka, Desa Gunaksa
- Lahan di Kelurahan Dauh Puri Denpasar Barat  
Luas: 35 meter persegi
- Lahan di Kelurahan Dauh Puri  
Luas: 12 meter persegi
- Lahan di Kelurahan Dauh Puri Kauh  
Luas: 47 meter persegi
- Lahan di Kelurahan Tonja, Denpasar  
Luas: 200 meter persegi
- Lahan di Seminyak, Kuta, Badung  
Luas: 97 meter persegi

Edisi : Kamis, 21, Feb, 2019

Hal : 1



Sambungan Hal. 1

## 10 Aset Mantan...

Sambungan Hal.1

korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. "Saat ini baru 10 bidang aset milik Wayan Candra yang sudah siap dilelang, termasuk Puri Cempaka. Semua sedang berproses," ujar Kajari Klungkung, Otto Sompohan, Rabu (20/2).

Total ada 51 bidang aset milik Wayan Candra yang disita Kejari Klungkung. Namun baru 10 bidang aset yang tersebar di wilayah Klungkung, Nusa Penida, dan Denpasar yang bisa diproses lelang. Sementara 41 bidang aset lainnya yang sebagian besar berada di Eks Galian C masih diidentifikasi.

Pihak Kejaksaan sempat kesulitan untuk menentukan titik-titik aset milik Wayan Candra di Eks Galian C. Terlebih aset berupa lahan kosong itu, sempat diterjang lahar dingin beberapa waktu lalu sehingga kontur tanah sempat berubah.

"Dulu pengukuran tanahnya belum memakai titik koordinat. Pasca erupsi Gunung Agung, ternyata kontur tanah berubah. Tapal batas juga sulit kita temukan. Jangan sampai kami salah eksekusi," terang Otto.

Menurutnya, saat ini pihak Kejari telah banyak berkoordinasi dengan BPN Klungkung, dan saat ini identifikasi aset Wayan Candra di Eks Galian C itu sudah memasuki tahap akhir.

"Jangan sampai, yang kita eksekusi itu ternyata tanah milik warga lain. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan pertanahan, dan sekarang tinggal tahap akhir," jelasnya.

Meskipun belum dapat memastikan kapan pastinya lelang akan dilakukan, pihaknya mengatakan proses lelang akan dilakukan secara bertahap.

"Kami tidak dapat pastikan kapan lelangnya, tapi tetap usahakan secepatnya dan semua berproses. Kami usahakan agar tahun ini lelang sudah bisa dilakukan, dan semuanya lalu bertahap," ungkapnya.

Sementara menurut Otto, dalam aturan sangat dimungkinkan juga jika ada aset sita-

an yang dapat digunakan untuk kepentingan negara. Terkait hal ini pihaknya juga masih berkoordinasi dengan pimpinan (Kejati Bali), jika ada aset yang akan dimanfaatkan.

"Jika ada aset yang kami butuhkan, bisa dimohonkan ke Kementerian Keuangan. Misal untuk pembangunan kantor dan sebagainya. Ini juga masih kita koordinasikan," jelasnya.

Wayan Candra merupakan mantan Bupati Klungkung, yang saat ini berstatus terpidana kasus korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. Berdasarkan putusan MA, ia divonis pidana kurungan 18 tahun, dan denda Rp 10 miliar dengan subsider kurungan 1 tahun sembilan bulan.

Selain itu, Wayan Candra juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 42 miliar dan beberapa aset yang mejadi barang bukti disita untuk negara.

### Telah Dikosongkan

Sementara itu, Kasubag Pembinaan Personil Kejari Klungkung Cokorda Gde Putra menjelaskan, saat ini Puri Cempaka yang sebelumnya menjadi kediaman Wayan Candra telah dikosongkan. Ia juga memaparkan, selain aset rumah, aset lainnya yang siap dilelang merupakan aset tanah dan beberapa ruko di Denpasar.

Aset Wayan Candra yang disita di Nusa Penida terletak di Desa Bunga Mekar dan Desa Ped. Sementara di Klungkung daratan terletak di Desa Tojan, Dawan Kaler, dan Puri Cempaka di Desa Gunaksa.

Sementara aset Wayan Candra di Denpasar yang akan dilelang terletak di Kelurahan Dauh Puri, Denpasar Barat, dan Kelurahan Tonja Denpasar Utara. Sementara di Kabupaten Badung aset Wayan Candra yang akan dilelang berlokasi di Seminyak.

"Sebelum lelang dilakukan, ada tahapan yang harus dilalui. Saat ini kami juga telah minta petunjuk ke Kejati Bali," ujarnya. (mit)

Edisi : Kamis, 21, Feb, 2019

Hal

7



## Belum Lengkap, Berkas Kasus Korupsi Pepadu dengan Tersangka KW

Negara (Bali Post) -

Kelanjutan kasus dugaan korupsi pengembangan pertanian terpadu (Pepadu) dengan tersangka KW, mantan pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga kini belum lengkap (P-19). Dari informasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, berkas kasus ini masih dalam posisi dikembalikan ke penyidik yang menangani, yakni Satreskrim Polres Jembrana karena belum lengkap.

Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra kepada wartawan mengatakan, berkas dengan tersangka KW menurutnya sudah dikem-

balikan ke penyidik beberapa bulan lalu untuk diperbaiki. Tetapi, hingga saat ini menurutnya berkas itu belum masuk lagi. "Sekarang berkas masih di penyidik, masih dilengkapi," tukasnya. KW yang saat itu menjabat Kepala Bidang di Dinas Pertanian merupakan tersangka kedua dalam kasus Pepadu ini.

Sebelumnya, penyidik menetapkan rekanan penyedia ternak sapi sebagai tersangka, yakni RA dan sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. RA saat itu mendapatkan putusan bebas.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan

sapi betina untuk program Pepadu. Polisi telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya rekanan pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK). KW yang menjabat Kabid saat itu menjadi PPK pengadaan sapi untuk kelompok itu.

Kuasa hukum terdakwa KW, I Made Merta Dwipa Negara, mengatakan, dari informasi terakhir berkas sudah dilimpahkan ke Kejari oleh penyidik namun dikembalikan lagi oleh jaksa Kejari Jembrana lantaran berkas yang belum lengkap atau P19. Menurutnya berkas itu sudah berulang kali dikembalikan jaksa dan dilengkapi penyidik. (kmb26)

Edisi : 21 Februari 2019

Hal : 10



## Sidang Dugaan Korupsi Biogas PPHP Sebut Pekerjaan Selesai 100 Persen

Denpasar (Bali Post)-

Sidang lanjutan dugaan korupsi bantuan biogas untuk masyarakat Nusa Penida, Rabu (20/2) kemarin dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa dari Kejari Klungkung menghadirkan lima orang saksi. Mereka adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Lima orang saksi itu adalah Putu Wisantara, Putu Adi Widiantika, Made Murna, Ni Wayan Murniati dan Gede wirta. Duduk sebagai terdakwa adalah oknum anggota DPRD Klungkung Gede Gita Gunawan, istrinya, Thiarta Ningsih dan I Made Catur Adnyana selaku KPA sekaligus PPK.

Di awal persidangan saksi terlihat keblinger, bahkan banyak mengaku tidak tahu, hingga majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila beberapa kali menegur saksi. Atas suara pelan dan saksi yang seolah tidak tahu masalah, majelis hakim mulai menanyakan dari hal paling mudah. Yakni tugas pokok PPHP. Saksi kemudian menjelaskan tugas mereka adalah menerima hasil pekerjaan dari panitia sebagai pelaksana.

Majelis hakim kemudian menanyakan secara gamblang apakah pekerjaan proyek biogas yang diawasi sudah 100 persen selesai, atau apakah ada yang kurang. Para saksi terlihat lama terdiam, dan setelah didesak mereka mengaku lupa. Untuk mengingatkan kembali memori para saksi, hakim menanyakan soal honor yang diterima para saksi. Mereka kompak mengatakan dapat Rp 150 ribu. Namun tidak semua mendapatkan uang yang sama, karena mereka ada yang bekerja lima kali, ada yang bekerja 12 kali. Honor diberikan tergantung jumlah kali mereka kerja.

Dari sanalah hakim memulai menanyakan ke substansi, yakni apakah saksi sudah bekerja dengan baik, apa belum. Karena ada saksi yang mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen. Sehingga dilakukan tanda tangan (penandatanganan) dan dilakukan penandatanganan berita acara. Jika sudah selesai 100 persen proyek tersebut, apa persoalannya hingga terdakwa duduk di kursi pesakitan? Ada masalah apa? Saksi pun kompak mengatakan tidak tahu masalah apa yang menjerat ketiga terdakwa tersebut.

Karena saksi mengaku tidak tahu, majelis hakim kembali meminta saksi mengingat-mengingat, termasuk apakah pernah mendengar di masyarakat atau membaca di media. Salah satu saksi kemudian menjawab pernah membaca di media, bahwa ada kekurangan pengerjaan dari 40 unit, yang terlaksana 38 unit. Jadi ada kurang lagi dua unit. Atas kekurangan itu, mengapa dilakukan penandatanganan berita acara bahwa pekerjaan sudah selesai 100 persen. Saksi mengaku bahwa dia menerima laporan bahwa sudah dikerjakan 100 persen, karena 40 unit itu sudah rampung.

Kuasa hukum Gede Gita Gunawan, dan istrinya Thiarta Ningsih, Agus Sujoko, kemudian menanyakan mana duluan tanda tangan pengerjaan selesai 100 persen, apa baca di media? Saksi mengatakan duluan tanda tangan pengerjaan selesai 100 persen. Saat didesak oleh kuasa hukum Catur, Mardika, para saksi juga mengataman pekerjaan selesai 100 persen. Dasar menandatangani selain laporan karena fisik proyek itu ada, walau diakui saat itu tidak semua unit diperiksa.

Perihal pengerjaan 100 persen itu juga dipertegas dalam persidangan sebelumnya. Persisnya dari keterangan saksi, konsultan I Made Dirganata dan staff CV Pilar Utama I Wayan Sukahana, dan pelaksana lapangan I Komang Sudiatmika. Mereka mengatakan 40 unit itu telah selesai dan sudah bisa digunakan, apabila tersedia bahan biogas seperti kotoran sapi dan air tawar. (kmb37)

Edisi : 21 Februari 2011

Hal : 2



## Ada 131 Penerima Dana Hibah Belum Setor LPJ, Mayoritas Ormas

TABANAN, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Tabanan menyalurkan dana di tahun 2018 sebanyak 1.549 objek. Dana hibah disalurkan lewat APBD induk 987 objek dan APBD perubahan 562 objek. Ternyata dari jumlah itu, ada 131 objek dana hibah belum jelas laporan pertanggung jawabannya (LPJ). Terkait hal tersebut Pemkab Tabanan khawatir akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Belum beresnya seratusan LPJ dana hibah itu terungkap saat Tim Anggaran Pemerintah Saerah (TAPD) Tabanan menggelar rapat kerja realisasi hibah dengan anggota DPRD Tabanan, Rabu (20/2). Dana hibah yang tersebar itu nilai nominalnya hingga miliaran rupiah.

Asisten III Sekda Tabanan Bidang Administrasi Umum I Made Sukada, menjelaskan dana hibah sudah disalurkan tahun 2018. Namun ada 131 penerima dana hibah yang laporan pertanggung jawabannya (LPJ) belum ada. Pada APBD induk 2018 ada 36 dana hibah yang LPJ belum ada dan belum diselesaikan. Kemudian APBD perubahan 2018 ada 95 penerima dana hibah juga belum menyelesaikan LPJ-nya.

"Sebagian besar penerima dana hibah adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Apalagi saat ini ada BPK di Tabanan dan meminta nantinya LPJ dana hibah tersebut, sehingga kami akan bentuk tim," ungkapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti pun khawatir akan dana hibah yang sudah disalurkan, namun LPJ masing-masing objek belum tuntas. Mengingat dana hibah sudah tersalurkan tahun 2018 dan saat ini ada BPK sedang di Tabanan sejak awal Februari. "Ya kami takutkan itu jadi temuan," ujarnya.

Disinggung terkait kendala banyak LPJ belum diselesaikan oleh penerima, Budiarti mengaku karena masalah kecil seperti kelengkapan kwitansi dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Untuk jumlahnya saya tidak ingat karena saking banyaknya," katanya.

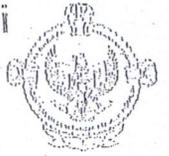
Dengan kondisi tersebut pihaknya bersama OPD terkait sudah membentuk tim untuk menelusuri ke bawah. Seperti berkoordinasi dengan camat dan perbekel. Karena dia menargetkan akhir Februari 2019 harus tuntas. "Pokoknya kami akan kejar, harus selesai akhir Februari," tegas Budiarti.

Sementara Ketua DPRD Tabanan I Ketut 'Boping' Suryadi, menegaskan bahwa harus digarisbawahi soal dana hibah. Dewan bukan penerima atau mendapat hibah, tetapi dewan hanya sebagai fasilitasi dan mengarahkan kepada konstituennya.

"Kebijakan dan kekuasaan penuh yang berhak memberikan dana hibah atau tidak tetap berada di eksekutif. Karena eksekutif sebelum mencairkan dana hibah, melakukan survei dan penelitian. Layak kah atau tidak didapat atau diberikan ke objek hibah tersebut. Sekali lagi dewan tidak memiliki wewenang hibah. Kebijakan penuh berada di eksekutif," ucapnya.

Menurut Boping, pihak eksekutif di masing-masing OPD setelah mencairkan dana hibah ke rekening penerima dana hibah, seharusnya melakukan pemberitahuan dan pendampingan kepada penerima hibah. Fungsinya agar penerima hibah benar paham dan menyiapkan LPJ.

Masih banyak LPJ dana hibah belum tuntas tahun 2018 bisa mengancam proses pencairan dana hibah 2019. "Kami berharap juga segera penerima hibah lakukan penyelesaian LPJ," tandasnya. **de**



HUMAS PEMKAB BANGLI FOR RADAR BALI

PUJI KEPALA DESA: Wabup Sedana Arta di sela Bimtek.

## Wabup Sedana Arta Apresiasi Perangkat Desa

**BANGLI** - Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan apresiasinya terhadap keberhasilan aparatur pemerintah desa di Bangli. Khususnya, dalam mengelola anggaran. Menurut Wabup Sedana Arta, meski mengelola anggaran sangat besar, namun aparatur pemerintah desa, khususnya para perbekel mampu menata kelola keuangan dengan baik.

"Sehingga, di Bangli sampai saat ini, tidak ditemukan catatan-catatan merah, terkait dengan pengelolaan keuangan desa," kata Wabup Sedana Arta, saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, diikuti perbekel se-Bangli, di Ruang Pertemuan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali, pada Rabu kemarin (20/2).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dikelola desa dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bangli, perbedaannya sangat signifikan. Karena satu OPD rata-rata hanya mengelola anggaran Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Berbeda dengan desa yang bisa mengelola anggaran Rp 5 miliar sampai Rp 13 miliar. Besarnya dana yang dikelola desa-desa di Bangli, membuktikan kemampuan aparatur pemerintah desa di Bangli sudah sangat baik.

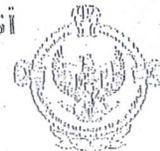
"Saya sangat mengapresiasi kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah desa di Bangli. Bayangkan, hanya dengan sumberdaya manusia (SDM) yang sangat terbatas, satu orang kepala desa, satu orang sekretaris, tiga orang kaur, dan tiga orang kasi, mampu mengelola anggaran yang sangat besar. Jadi saya sangat mengapresiasi ini," terangnya penuh semangat.

Kebih lanjut Wabup mengingatkan, dengan besarnya anggaran yang masuk ke desa, tentu kegiatan-kegiatan di desa akan menjadi objek perhatian banyak pihak. Baik Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karenanya, ia mengingatkan perbekel selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun laporan kegiatan.

Sementara itu, terkait dengan hajatan politik, yakni; gawe pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), serta pemilihan legislatif (Pileg) yang saat ini tinggal menghitung hari saja, untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Bangli, Wabup Sedana Arta mengingatkan agar perbekel bisa menjaga netralitas dalam kapasitas sebagai kepala desa. (adv/ayu/djo)

Edisi : 21 Februari 2019

Hal. : 3



**TIPIKOR**

## Dugaan Korupsi Pepadu Mengendap

**NEGARA** - Kasus dugaan korupsi pengembangan pertanian terpadu (pepadu) yang menyeret tersangka KW, mantan pegawai negeri sipil (PNS) saat menjadi kepala bidang pertanian dinas pertanian dan pangan, hingga saat ini belum ada kepastian. Padahal, kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Jembrana sejak awal tahun 2018 lalu.

Bahkan, kuasa hukum terdakwa KW, I Made Merta Dwipa Negara, juga tidak mengetahui kelanjutan kasus tersebut. Menurutnya, kabar terakhir berkas sudah dikembalikan lagi oleh jaksa Kejari Jembrana karena berkas yang belum lengkap atau P19. "Info terakhir berkas sudah dilimpahkan, tapi berkas belum lengkap," jelasnya, Rabu kemarin (20/2).

Berkas tersebut sudah berulang kali dikembalikan jaksa dan dilengkapi penyidik, namun hingga saat ini belum ada kepastian berkas masih di penyidik atau dikembalikan lagi. "Jaksa yang lebih tahu apa saja kekurangan berkas," ujarnya.

Kasipidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra dikonfirmasi terpisah mengatakan, berkas kasus dugaan korupsi Pepadu dengan terdakwa KW sudah dikembalikan pada penyidik untuk diperbaiki sejak beberapa bulan lalu, namun sampai saat ini berkas belum masuk lagi. "Posisi berkas sekarang ada di penyidik, masih dilengkapi," terangnya.

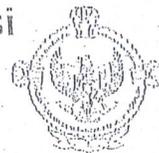
Kasus korupsi yang melibatkan KW, mengenai pengadaan sapi betina dalam program pepadu. Polisi menetapkan KW sebagai tersangka karena sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain KW, polisi menetapkan rekanan sebagai tersangka yakni YA dari pihak rekanan. Rawi Adnyani diadili dan mendapat putusan bebas dari pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Denpasar.

Nasib KW sebagai PNS juga "digantung". Hingga memasuki usia pensiun awal Januari lalu, tidak diberhentikan atau pensiun sebagai PNS. Karena sudah masa pensiun, KW tetap tidak ngantar meski tidak diberhentikan atau dipensiunkan tanpa tunjangan pensiun dan tidak lagi menerima gaji.

Keputusan status quo tersebut berdasarkan hasil dari konsultasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). KW tidak bisa pensiun sebelum ada putusan hukum tetap dari pengadilan terkait kasus hukum yang menjeratnya. **(bas/han)**

Edisi : Kamis, 21, Feb, 2019

Hal. : 6



DEWA AYU PITRI ARISANTI / RADAR BALI

**MEWAH** : Bagian depan rumah yang dulu menjadi tempat tinggal keluarga mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Dawan, ini juga bakal dilelang.

## 10 Aset Wayan Candra Dilelang

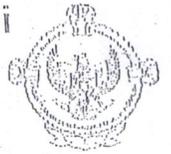
**SEMARAPURA** - Harta Wayan Candra bakal habis. Ini lantaran 10 dari 51 bidang tanah beserta bangunan milik mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, yang dirampas negara atas

kasus korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pembangunan dermaga Gunaksa kini sedang dalam pengajuan proses lelang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung.

Sementara sisanya belum dapat diproses untuk dilelang. Ini lantaran batas-batas lahan yang disita negara tersebut belum jelas ■

► *Baca 10 Aset... Hal 7*

Edisi : Kamis, 21, Feb, 2019  
Hal. : 1



Sambungan hal 1

## Puri Cempaka juga Dilelang

### ■ 10 ASET...

Sambungan dari hal 1

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Otto Sompotan saat ditemui di kantor Kejari Klungkung, Rabu (20/2) menjelaskan, berkaitan dengan barang rampasan negara atas kasus korupsi Candra akan dilakukan eksekusi, baik itu dengan pelelangan atau digunakan untuk kepentingan negara. "Kami tetap akan melakukan putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Adapun dari 51 bidang tanah dan bangunan yang disita itu, menurutnya baru 10 bidang tanah yang diserahkan ke Bagian Pembinaan untuk pengajuan proses lelang.

Sementara sisanya menurutnya masih dalam proses penetapan tapal batasnya. Menurutnya, sek-

itar 41 bidang tanah itu terdapat di bekas galian C yang kemudian karena lahar hujan akhirnya tapal batasnya tertutup dan tidak jelas.

"Sehingga kami perjas dulu mengenai tapal batas ini bersama BPN sebelum kami eksekusi. Lelang kami lakukan bertahap. Kalau kami lakukan sekalian, akan memakan waktu lama," terangnya.

Berkaitan dengan aset sitaan negara yang kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara, menurutnya hal itu masih didiskusikan lebih lanjut. "Kalau misalnya ada aset yang kira-kira dibutuhkan, itu bisa dimohonkan ke Kementerian Keuangannya dan jajaran daerah, bahwa ini akan gunakan langsung" ujarnya.

Pihaknya menambahkan, bahwa aset-aset Candra yang disita tersebut tidak ada yang ditempati atau dipinjamkan. "Dalam

status sudah inkraht sudah tidak bisa ditempati. Tidak boleh ada yang masuk selain petugas kejaksaan," tandasnya.

Sementara itu, Kasubag Pembinaan, Kejari Klungkung, Cokorda Gede Putra menambahkan, aset-aset Candra yang sudah diserahkan ke Bagian Pembinaan untuk pengajuan proses lelang itu tersebar di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Klungkung daratan dan Denpasar. "Untuk kegiatan lelang 10 bidang tanah dan bangunan itu. Kami telah bersurat dan masih menunggu surat balasan dari Kejati," ungkapnya.

Adapun 10 bidang tanah dan bangunan sitaan negara yang diajukan untuk dilelang tersebut, yaitu sebidang tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa Bunga Mekar, sebidang tanah seluas 10 ribu meter persegi di Desa

Ped, Kecamatan Nusa Penida, sebidang tanah seluas 850 meter persegi di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, sebidang tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan. Kemudian sebidang tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunan di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat.

Ada juga sebidang tanah seluas 12 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, sebidang tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat.

Selain itu, rumah yang dulu jadi tempat tinggal Candra beserta keluarga di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Dawan, atau yang lebih dikenal dengan Puri Cempaka juga akan dilelang. (ayu/pit)

Edisi : Kamis, 21, Feb, 2019

Hal. : 7



## Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Perbekel Selat Eks Perbekel, Panitia dan Penjual Tanah Diperiksa

SEMARAPURA, NusaBali

Jajaran Reskrimsus Polda Bali tengah mendalami laporan dari masyarakat terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk membangun kantor Perbekel Desa Selat, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, 2015 lalu. Setelah menyita berkas dalam pengadaan tanah tersebut, kali ini Polda memeriksa sejumlah saksi atas pengadaan tanah tersebut.

Dalam pemeriksaan para saksi ini, Polda meminjam lokasi di Polsek Klungkung. Pemeriksaan dilakukan sejak Rabu (20/2) pagi, dengan memanggil mantan Perbekel Selat I Wayan Sudiana, Ketua Tim Pengadaan Tanah Ketut Ariawan yang saat ini masih menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) Selat, dan penjual Putu Tika Winawan, yang juga eks Anggota DPRD Klungkung.

Setelah itu Kamis (21/2) Polda kembali memeriksa 6 orang saksi, yaitu Mantan Ketua BPD Desa Selat I Wayan Adnyana, Ketua Tim Pengadaan Tanah Ketut Ariawan, Mantan Sekretaris BPD Desa Selat dan anggota BPD Ida Bagus Maha Putra, Tim Penaksir Harga I Ketut Tantra, serta anggota Tim Penaksir Harga I Nengah Suartana.

Informasi yang dihimpun pemeriksaan ini terkait mark up pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan Kantor Desa Selat. Di mana pemeriksaan dilakukan oleh Tim Tipikor Polda Bali yang dipimpin Kopol I Gede Aryanta, Panit I Tipikor Polda Bali I Nyoman Sarka, beserta tiga orang anggotanya. Hanya saja Kopol Aryanta belum bisa memberikan keterangan terhadap pemeriksaan. "Mohon maaf kami belum bisa berikan keterangan terkait pemeriksaan ini," katanya.

Kasus dugaan mark up pengadaan tanah mencuat setelah mendaat dari mendapat sorotan, persoalan ini hingga dilaporkan lewat sepucuk surat yang mengatasnamakan warga Desa Selat, ke Kajati Bali, tertanggal per 3 Desember 2018, dan mendapat atensi dari Polda Bali. Karena pembelian harga tanah jauh lebih tinggi dari nilai jual obyek pajak (NJOP) dari Rp 20 juta/are menjadi Rp 150 juta per are.

Kemudian ditindaklanjuti oleh

Ditreskrimsus Polda Bali, Selasa (15/1), petugas kepolisian menyita berkas pelepasan tanah dan pembangunan kantor Desa Selat. Adapun beberapa point dalam surat yang dilayangkan kepada Kajati Bali tersebut, tertulis dalam NJOP tanah tersebut seharga 20 juta/are. Di mana tanah tersebut dibeli oleh pemiliknya sekarang dari pemilik sebelumnya seharga Rp 7,5 juta/are.

Tanah tersebut kemudian dijual ke desa per arenya seharga Rp 150 juta, jika dikalikan seluas 6 are maka akan seharga Rp 900 juta. Pembayaran menggunakan dana ADD Desa Selat 2 x termin penerimaan ADD tahun 2015 dan 2016.

Putu Tika Winawan saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut mengatakan, mengakui memang benar diminta keterangan dari Polda. "Iya benar, terkait penjualan tanah. Saya ditanya benar seharga Rp 150 juta (per are), ya benar. Apakah sudah melalui rapat, sepengetahuan tiang sudah melalui rapat, lewat musyawarah BPD, dan proses notaris, surat di BPN," ujar Putu Tika Winawan. Untuk bukti tersebut sudah diambil oleh penyidik. Menurut Tika Winawan harganya tanah yang dijual tersebut sudah tepat, dirinya memang membeli tanah tersebut seharga Rp 7 juta tapi pada tahun 1990. Selain itu juga sudah ada penandingan jarga, untuk harga tanah di utara harganya sudah Rp 250 juta /are, sebelah barat sudah Rp 135 juta /are.

Selain harga tanah, dalam surat tersebut juga menyoroti tentang pembangunan Kantor Desa Selat, yang dikerjakan selama 6 bulan dari 16 Mei-16 November 2018. Tertulis, salah satunya menyebutkan bangunan tidak sesuai bestex sehingga pembangunan Kantor Perbekel Desa Selat mangkrak. Perbekel Desa Selat, Gusti Putu Ngurah Adnyana, mengaku sesuai dengan pelaksanaan proyek pembangunan memang yang dikerjakan 2018 itu hanya 60 persen saja. "Itu bukan mangkrak, karena pembangunannya dilakukan bertahap atau pembangunan terus berlanjut," ujarnya belum lama ini. **wan**



# Dana BOS Belum Cair



• DOK NUSABALI  
KADISDIK Bangli, I Nyoman Suteja

Siswa SD dapat  
Rp 800 ribu per  
siswa dan SMP Rp  
1 juta per siswa.

BANGLI, NusaBali

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP pada tri wulan I tahun ajaran 2018/2019 belum cair. Imbasnya sejumlah kegiatan atau program sekolah tertunda. Dana BOS masuk rekening sekolah dicairkan setiap tiga bulan sekali. Sementara kegiatan pada bulan Februari cukup padat,

salah satunya penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

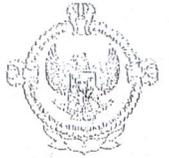
Salah seorang kepala sekolah SMP mengaku akibat dana BOS belum cair, sekolah pakai dana swadaya untuk penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali mengeluarkan dana cukup besar, selain di internal sekolah juga ikut lomba di luar Kabupaten Karangaasem. Dikatakan, setiap tahun kondisinya seperti ini. "Tahun-tahun sebelumnya juga dicairkan pada akhir bulan dan itu pada bulan ketiga. Kami tidak tahu alasan dana BOS cair di bulan-

bulan terakhir pada kurun waktu satu tri wulan," ujarnya, Jumat (22/2).

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli, I Nyoman Suteja, mengungkapkan dana BOS langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. Pencairan dana BOS dilakukan secara bertahap, tri wulan I, tri wulan II, tri wulan III, dan tri wulan IV. "Pencarian bertahap per tri wulan. Kami sudah menerima bukti pencairan dari provinsi. Selanjutnya dana ditransfer ke masing-masing rekening seko-

lah," bebernya. Diperkirakan dalam waktu dekat dana sudah masuk ke rekening sekolah.

Nyoman Suteja menyampaikan, dana yang diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik. SD besarnya Rp 800 ribu per siswa dan untuk SMP Rp 1 juta per siswa. "Pemerintah menyalurkan dana sesuai data pokok pendidikan (Dapodik). Dengan begitu tidak ada yang tercecer, kalau ada pergeseran siswa tentu akan langsung ada perubahan," terangnya. Tahun ini dana BOS yang diterima sekolah SD/SMP Rp 30 miliar lebih. **es**



## Dana Desa Tahap I Segera Digelontorkan Alokasi Naik Dibanding 2018

Negara (Bali Post) -

Alokasi Dana Desa untuk 41 desa di Kabupaten Jembrana tahun ini naik dibanding tahun sebelumnya. Alokasi dasar dengan nilai sama masing-masing desa tahun ini Rp 672.421.000, naik berkisar Rp 50 juta dari tahun 2018 yakni 616.345.000 masing-masing desa. Dinas PMD menargetkan pada Februari atau awal Maret ini pencairan tahap pertama Dana Desa sudah dilakukan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana I Gede Sujana, belum lama ini mengungkapkan, target pencairan dana desa diharapkan bisa dilakukan Februari ini. Tetapi saat ini masih dilakukan *input* data terkait pelaporan serapan dana desa tahap akhir tahun 2018. "Kita harapkan Februari ini, tapi paling lambat Maret ini sudah dialokasikan," terang Sujana, Jumat (22/2) kemarin. Sujana menambahkan, penga-

lokasian Dana Desa selain alokasi dasar, juga ditambah dengan alokasi formula dan alokasi afirmasi. Untuk alokasi formula yang merupakan tambahan dari alokasi dasar ditentukan berdasarkan rasio jumlah penduduk, luas wilayah serta geografis masing-masing desa dan penduduk miskin.

Sementara untuk alokasi afirmasi diberikan untuk kategori desa tertinggal. Sementara di Jembrana, dari 41 desa tidak ada desa yang

masuk desa tertinggal. Berbeda dengan tahun lalu, di mana ada dua desa yang masuk kategori desa tertinggal yakni Desa Warnasari dan Desa Manisitutu, keduanya di Kecamatan Melaya. "Tahun ini tidak ada (desa tertinggal), sehingga kita tidak menerima alokasi afirmasi," tandas mantan Camat Mendoyo ini.

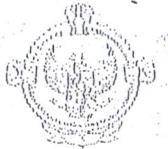
Total dana desa yang dialokasikan untuk Jembrana dari pemerintah pusat senilai Rp 49.043.178.000. Naik sekitar Rp 9.651.454.000

dibanding tahun 2018. Untuk di Jembrana, menurutnya alokasi dana desa tertinggi ada di Desa Melaya, yakni Rp 1.152.636.368. Sedangkan yang nilainya terkecil di desa Mendoyo Dangin Tukad sebanyak Rp 237.367.556.

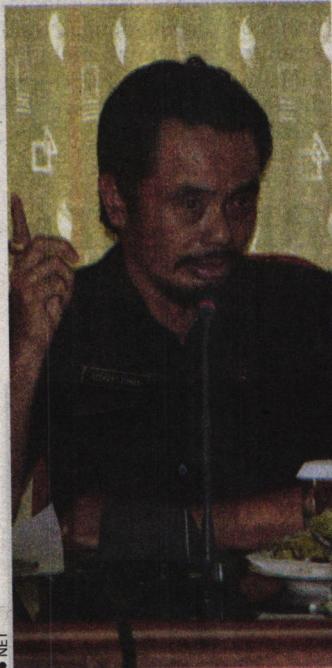
Sesuai aturan pencairan untuk Dana Desa ini dibagi menjadi tiga tahap. 20 persen di tahap I, selanjutnya disusul tahap II dan III sebesar 40 persen dari anggaran. (kmb26)

Edisi : Sabtu, 23, Feb, 2019

Hal : hal 10



## Kecewa Bansos Dipangkas, Anggota DPRD Bali Minta Gubernur Koster Evaluasi



• NET

Nyoman Tirtawan

DENPASAR, NusaBali

Dipangkasnya dana bansos/hibah untuk anggota DPRD Bali sebesar Rp 116 miliar dari Rp 374 miliar dalam APBD Induk 2019 memicu kekecewaan. Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Gabungan Pancabayu (gabungan NasDem, Hanura, PKPI, PAN) Nyoman Tirtawan mengatakan tidak ada alasan yang masuk akal memangkas dana bansos/hibah DPRD Bali sampai Rp 116 miliar.

Meskipun sudah ketok palu beberapa waktu lalu, Tirtawan tetap menolak pemotongan bansos/hibah tersebut. Menurutnya, sejak awal bansos/hibah sudah disepakati Rp 374 miliar. Bahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Induk 2019 seharusnya

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*

Edisi : Minggu, 24, Feb, 2019

Hal : hal 1



Sambungan hal 1

## Kecewa Bansos Dipangkas, Anggota DPRD...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ditandatangani pada Juli 2018, namun entah kenapa baru ditandatangani pada September 2018 yang kemudian justru langsung ada pemotongan bansos/hibah yang jumlahnya cukup signifikan.

"Ini *kan* menyangkut komitmen pemerintah terhadap masyarakat, kalau begini pemerintah *kan* tidak menepati komitmennya. Sama artinya dengan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan pemerintah. Kami minta Gubernur Bali evaluasi ini. UU Dasar saja bisa diamandemen, ini baru Perda APBD, sangat bisa dievaluasi," kata Tirtawan di Denpasar, Sabtu (23/2) siang.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak perlu sampai memotong bansos/hibah untuk pembangunan shortcut. Pemprov sebenarnya masih memiliki uang lebih. Selain itu Gubernur Bali Wayan Koster memiliki kemampuan bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat agar semua biaya pembangunan shortcut tersebut dianggarkan dari pusat.

Uang lebih yang dimaksud Tirtawan adalah per tahun 2019 ini Pemprov Bali memiliki anggaran sebesar Rp 598 miliar. Tahun 2019 sudah tidak ada pembangunan yang menyedot anggaran besar. Tidak ada membangun rumah sakit seperti RS Bali Mandara yang anggarannya sekitar Rp 200 miliar, sudah tidak ada lagi biaya pilgub atau pemilu seperti pada 2018 lalu yang totalnya habis Rp 250 miliar. Justru ada tambahan dari rasionalisasi biaya pilgub sebesar Rp 98 miliar dan ada

tambahan lagi Silpa sekitar Rp 50 miliar.

Kalau alasannya karena pembangunan shortcut Denpasar-Singaraja dengan anggaran Rp 160 miliar, masih banyak ada saldo. "Dulu saja ada pilgub, pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara tidak sampai mengubah struktur APBD. Saya hanya ingin pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif mengambil keputusan dengan baik dan benar," ucapnya.

Tirtawan menegaskan, pemotongan bansos/hibah ini telah melanggar konstitusi dan merusak sistem yang ada. Karena jika mau mengubah struktur APBD, harus ada alasan *principle* dan *force majeure*, sehingga APBD tersebut bisa diubah. "Bansos ini *kan* sudah diverifikasi dari jauh-jauh hari. Setelah diverifikasi akhirnya disahkan akan mendapatkan bansos. Nah, kalau sekarang ada pemotongan, tentu ini melanggar konstitusi. Ada dua alasan *principle* jika mau mengubah APBD, ada prosedur yang dilanggar, ada yang fiktif, tidak efektif efisien, dan *force majeure*. Kalau yang sekarang *kan* tidak ada hal itu, tapi karena alasan untuk membangun shortcut. Ini tidak benar, merusak sistem namanya. Dalam menyusun anggaran harus berpedoman pada aturan, bukan bertentangan. Semua sudah masuk e-planning dan e-budgeting," kata politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, ini.

Tirtawan menjelaskan kalau sekarang eksekutif (Gubernur Bali) memotong bansos/hibah hanya karena untuk pembangunan shortcut, dia justru

merasa ada kepentingan lain di balik pemotongan tersebut. "Masyarakat (calon penerima bansos/hibah, *Red*) sudah memiliki rencana sesuai dengan apa yang diajukan. Kalau sekarang anggarannya itu dipotong, apakah mereka akan mampu melaksanakan kegiatan dengan baik. Ibaratnya kalau mereka akan membangun jembatan dengan biaya Rp 100 juta, terus sekarang dipotong Rp 30 juta, apakah proyek itu bisa selesai 100 persen. Artinya jembatannya tidak selesai dengan baik. Ini jelas telah merusak sistem yang ada, ada prosedur yang diabaikan," tambahnya.

Kalau anggota DPRD Bali menolak pemotongan bansos/hibah, unsur pimpinan dewan berbeda lagi. Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dari Fraksi Golkar secara terpisah, Sabtu kemarin, mengatakan APBD Induk 2019 sudah diketok palu. Semua proses pun sudah dilalui. "Jadi tidak mungkin akan dievaluasi lagi angkanya. Karena sudah diketok palu. Memang ada verifikasi awalnya, tetapi pusat bisa menambah bisa mengurangi. Namanya rasionalisasi," kata politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster belum bisa dimintai komentar. Saat dihubungi *NusaBali* melalui ponselnya tidak aktif. Sementara Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali Gede Darmawan dikonfirmasi mengatakan masih ada kegiatan adat di kampung. "Saya masih ada kegiatan adat di kampung, nanti saya hubungi balik," ujarnya. **nat**

Edisi : Minggu, 24, Feb, 2019

Hal : hal 15